

Kadin Kota Serang Buka Pendaftaran Balon Ketua

SERANG (IM)- Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Serang periode 2019-2023 akan berakhir masa baktinya pada 22 Mei 2023.

Untuk itu, Kadin Kota Serang membuka pendaftaran Bakal Calon (Balon) Ketua KADIN Kota Serang periode 2023-2028 pada Musyawarah Kota (Muskot) IV Tahun 2023. "Musyawarah IV Kadin Kota Serang akan diselenggarakan pada Senin, 20 Maret 2023," ujar Ketua Kadin Kota Serang, Tubagus Ibnu Nurul Ibadurrahman kepada wartawan, Kamis (23/2).

Ibnu menjelaskan, kepastian digelar muskot berdasarkan hasil keputusan Rapat Pengurus Kadin Kota Serang masa bhakti 2019-2023 pada Minggu (19/2) lalu.

Setelah rapat, pihaknya melakukan konsultasi kepada Wakil Ketua I Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Kadin Provinsi Banten pada Rabu (22/2), tentang kepastian berakhirnya Kepengurusan Kadin Kota Serang masa bhakti 2019-2023 pada 22 Mei 2023.

"Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa situasi dan kondisi tahun 2023 se-

bagai tahun politik dengan segala dinamikanya, tentu akan banyak menyita perhatian masyarakat terlebih bagi para pengusaha di Kota Serang," katanya.

"Sehingga dipandang perlu memajukan muskot maksimal dua bulan sebelum berakhirnya masa bhakti kepengurusan," tambah Ibnu.

Ibnu mengatakan, sesuai ketentuan peraturan organisasi bahwa musyawarah Kadin dapat dilaksanakan maksimal dua bulan sebelum berakhirnya masa bhakti kepengurusan sebelumnya yakni 22 Mei 2023 atau paling lambat dua bulan setelahnya.

Dalam rangkaian tahap penyelenggaraan Muskot, kata Ibnu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi Kadin bahwa muskot diawali dengan penyampaian dan pengumuman kepada publik selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan.

Adapun untuk pendaftaran mulai dibuka pada 19 Februari sampai 20 Maret 2023. Bagi yang berminat untuk maju mencalonkan sebagai Balon Ketua Kadin Kota Serang bisa mengambil formulir untuk memenuhinya berbagai persyaratannya. ● pra

RSKD Dadi Makassar Siapkan Bed Khusus Caleg Gagal Pemilu 2024

MAKASSAR (IM)- Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar menyiapkan tempat tidur bagi calon legislatif (caleg) gagal pada pemilu 2024. Salah satu syaratnya yakni mereka adalah anggota BPJS Kesehatan.

"Kita ada kamar, VIP hingga VVIP untuk perawatan bagi mereka (caleg tidak terpilih), dengan catatan mereka punya BPJS Kesehatan," ujar Direktur RSKD Dadi, dr Arman Bausat di Makassar dikutip dari ANTARA, Kamis (23/2).

RSKD Dadi di Makassar adalah Pusat Rujukan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Otak, dan Saraf Tulang Belakang di wilayah Sulawesi Selatan. Menurut dr Arman, stres berat hingga fase depresi bisa dialami oleh mereka yang ti-

tidak mendapatkan hasil sesuai ekspektasi. Biasanya setelah pemilu, sejumlah caleg harus menjalani perawatan mental di RSKD Dadi.

"Mereka sudah korban banyak pada pemilu tapi tidak terpilih, tentu dia akan depresi, tapi ini tergantung mentalnya. Setelah depresi, maka akan tertekan dan masuk pada fase halusinasi," ujarnya.

Selain itu, dr Arman juga mengatakan pihak rumah sakit telah menyiapkan anggaran pemulsaan jenazah bagi pasien yang meninggal.

"Jika ada pasien yang meninggal, kami biayai semua kain kafannya, karena banayak yang sudah tidak dicari atau ditunggu keluarganya. Makanya ada yang telah 25 tahun di RSKD Dadi, seperti dari NTT, Kalimantan dan Sulbar," pungkasnya. ● pra



IDN/ANTARA

GERAKAN PANGAN MURAH DI KABUPATEN BOGOR

Sejumlah warga antre membeli barang kebutuhan pokok saat gerakan pangan murah di Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/2). Gerakan pangan murah yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor tersebut untuk stabilisasi pasokan dan harga bahan pangan pokok murah untuk masyarakat.

Dinkes Tangsel Optimistis Bisa Tekan Angka Stunting Hingga 7 Persen

Kepala Dinkes Tangsel, dr. Allin Hendalin Mahdaniar MKM, mengatakan tugas terberatnya saat ini dalam menekan angka stunting adalah dengan memastikan memutus mata rantai kasus, supaya tidak muncul kasus baru.

TANGSEL (IM)- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menargetkan dapat menekan angka kasus stunting (gagal tumbuh pada balita) hingga 7 persen.

Kepala Dinkes Tangsel, dr. Allin Hendalin Mahdaniar

MKM, mengatakan, upaya dalam menekan angka stunting di Tangsel perlahan mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Kasusnya pun semakin menurun tiap tahun.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), stunting di Tangsel tahun

2021, angkanya 19,9 persen. Kemudian kasusnya menurun cukup drastis ditahun 2022, menjadi 9 persen.

Selain itu merujuk data dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Masyarakat, dari 133 ribu balita yang ada di Tangsel, yang tercatat sebagai balita pendek dan sangat pendek, kemudian dikategorikan sebagai stunting, saat ini jumlahnya hanya 1 persen saja.

"Jadi rasanya sih, optimis di tahun 2023-2024 ini bisa turun sampai 7 persen, bila melihat data saat ini," jelas Allin, Kamis (23/2).

Allin mengatakan, tugas terberat pihaknya saat ini

dalam menekan angka stunting adalah dengan memastikan memutus mata rantai kasus, supaya tidak muncul kasus baru.

"Sebanyak 1300-an balita itu memang akan kita selesaikan dengan asupan gizi yang kita berikan di wilayahnya, agar tinggi dan berat badannya bertambah," ujarnya.

Menurut Allin, ada enam program kesehatan yang telah digulirkan tahun ini salah satunya untuk mengintervensi kasus stunting, yakni program pemenuhan kesehatan perorangan dan masyarakat, program pemberdayaan masyarakat, program peningkatan kapasitas Sumber Daya

Manusia (SDM) pada petugas kesehatan, program peningkatan ketersediaan farmasi, program peningkatan alat kesehatan, makan dan minuman serta program penunjang urusan daerah.

Selain itu juga ada enam upaya mentransformasi layanan kesehatan antara lain, transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan. "Bila dilihat dari satu persatu, rasanya Tangsel sudah ikut di dalamnya," ujar Allin. ● pp

Masyarakat Kab. Tangerang Diimbau Waspada Terhadap Dukun Palsu

TANGERANG (IM)- Polresta Tangerang mengimbau masyarakat agar waspada terhadap dukun palsu yang menggunakan berbagai modus. Seperti pengobatan alternatif, menggandakan uang, usir roh jahat, penglaris usaha, enteng jodoh, dan pemikat lawan jenis. "Kepada seluruh

warga Kabupaten Tangerang saya berpesan, agar waspada terhadap dukun palsu dan dukun cabul," kata Kapolresta Tangerang, Kombes Pol. Sigit Dany Setiyo, Kamis (23/2).

Menurutnya, percaya kepada dukun adalah sebuah kemusyrikan dan dosa besar. Makanya harus pertebal keimanan kepada

tuhan yang maha esa

Dirinya juga meminta kepada masyarakat jika menemukan praktik perdukunan palsu dan cabul segera lapor polisi. "Jika memang ada korban atau memang mengetahui adanya praktik perdukunan palsu dan cabul, harap menghubungi kantor polisi terdekat

atau bisa menghubungi Call Center Halo Pak Kapolres di 081112301110," terangnya.

Dirinya juga menambahkan, ada beberapa kebohongan dukun yang wajib diketahui, seperti bisa menumbuhkan sugesti pasien, seperti menggunakan kata khodam, membuat ilmu karangan, membuat

ramalan palsu, dan menjual benda-benda palsu.

"Dan ada juga yang berdalih Al-Qur'an dan Hadits, nasihat munafik untuk menutupi sifat syirik. Serta meminta pasien untuk bersetubuh, meraba, memegang, dan meminta uang mahal," tukasnya. ● pp

Tukin Belum Cair, Pegawai Pemkot Cilegon Menjerit

CILEGON (IM)- Tunjangan Kinerja atau tukin pegawai Pemkot Cilegon belum cair hingga saat ini. Para pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon belum menerima tukin meski sudah sampai penghujung Februari.

Kondisi itu membuat para pegawai menjerit. Mereka mempertanyakan kapan salah satu hak sebagai pegawai itu mereka terima. "Januari dan Februari belum cair, masa sampai Maret," ujar salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya, Kamis (23/2).

Pegawai yang bekerja di gedung Graha Edhi Praja tersebut menjelaskan, kondisi itu mempengaruhi semangat pegawai dalam bekerja. Hal itu lantaran, tukin menjadi salah satu sumber yang diandalkan oleh para pegawai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

sehari-hari.

Keluhan belum cairnya tukin disuarakan oleh banyak pegawai di berbagai level eselon. Dari informasi yang dihimpun, sejumlah pegawai harus rela berutang terlebih dahulu agar bisa menutupi kebutuhan sehari-hari.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Dana Sujaksana menjelaskan, tukin diperkirakan cair bulan ini. Tukin menjadi perhatian para pegawai lantaran hingga Februari tak kunjung cair.

Diketahui, Tukin menjadi salah satu pemasukan yang sah bagi para pegawai pemerintahan utamanya Aparatur Sipil Negara (ASN). Tukin juga menjadi pendapatan yang diandalkan oleh para pegawai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. ● pra

Pemkab Tangerang Batasi Penggunaan Plastik Sekali Pakai

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mulai membatasi penggunaan plastik sekali pakai di wilayah Kabupaten Tangerang. Pembatasan tersebut berlaku mulai dari pasar tradisional, ritel modern, minimarket, swalayan hingga sejumlah mall besar di wilayah Kabupaten Tangerang.

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pembatasan plastik dilakukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 139 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang baru dilaksakan pada tahun 2023.

"Sebelumnya ada Perbup awal di tahun 2020, hanya saja pada saat mau diterapkan lalu pan-

dem, yang mengharuskan kita steril, bebas kuman pada seluruh keseharian kita. Makanan, minuman dan sampai melindungi tubuh kita," katanya, Kamis (23/2).

Bupati mengaskan, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan penerapan aturan daerah tersebut secara bertahap ke berbagai pengusaha perbelanjaan. Mulai dari pasar tradisional dan modern, ritel besar dan kecil, mini market, swalayan hingga pusat perbelanjaan atau mol yang ada di wilayahnya. "Tentu kita akan lakukan secara bertahap, mulai dari toko ritel modern hingga nantinya akan sampai ke pasar-pasar tradisional," ungkapnya. ● pp

Wabup Tangerang, H. Mad Romli Ajak Masyarakat Lebih Sadar Lingkungan

TANGERANG (IM)- Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, H. Mad Romli mengajak masyarakat untuk lebih sadar lingkungan. Hal tersebut disampaikan Wabup saat menghadiri acara penanaman mangrove dalam rangka peringatan HUT ke-51 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS).

"Mari kita maknai hari berbagia ini dengan memulai ikut serta dengan menjadi pribadi yang lebih sadar lingkungan agar terhindar dari berbagai hal yang tidak sepatutnya dirasakan akibat kelangkaan manusia kepada lingkungan sekitarnya," ajak H. Mad Romli di Hutan Mangrove Tanjung Pasir Kec. Teluknaga, Kamis (23/2).

Dalam sambutannya, Wabup H. Mad Romli juga mengatakan bahwa menanam mangrove merupakan tabun-

gan investasi untuk generasi mendatang. Menurutnya aksi ini bisa menjadi salah satu strategi yang efektif guna meminimalisir dampak bencana alam dan meningkatkan ekonomi masyarakat kedepannya.

"Kegiatan ini merupakan tabungan investasi untuk menciptakan kenyamanan lingkungan alam kita terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan anak cucu kita di masa mendatang," kata Wabup H. Mad Romli.

Sementara itu Kepala BASARNAS, Marsekal Madya TNI Hendri Alfiandi menjelaskan kegiatan penanaman mangrove di wilayah pesisir tersebut merupakan kegiatan rutin BASARNAS dalam rangka menjaga ekosistem berbagai biodata laut dan keseimbangan alam.

"Kegiatan ini sangat penting dan strategis guna menjaga

pelestarian dan keseimbangan alam yang menjaga kelangsungan hidup kita di masa sekarang maupun yang akan datang," kata Hendri.

Menurut Hendri, tanaman mangrove sehat dapat melindungi dari abrasi laut dan meminimalisir berbagai dampak bencana alam.

Dia berharap kegiatan ini juga dapat menggugah masyarakat untuk menjaga dan melestarikan mangrove demi terciptanya keseimbangan alam sehingga dapat memberikan manfaat baik untuk ekosistem lingkungan maupun masyarakat sekitarnya.

"Ada sekitar 1000 tanaman mangrove yang hari ini kita tanam di sekitaran pantai, untuk penghijauan, melindungi biota laut untuk bisa hidup. Kita juga akan melaksanakan terus menerus," tuturnya. ● joh



IST

Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, H. Mad Romli saat menghadiri acara penanaman mangrove dalam rangka peringatan HUT ke-51 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS).



IDN/ANTARA

PEMBUATAN KTP DIGITAL DI KOTA BOGOR

Petugas menunjukkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kantor Disdukcapil Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/2). Disdukcapil Kota Bogor membuka layanan untuk warga membuat KTP Digital melalui gawai di kantor Kecamatan, Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Zoom Meeting sebagai upaya mendukung target pemerintah sebanyak 50 juta penduduk Indonesia memiliki KTP Digital pada tahun 2023.

Anggota DPRD Pandeglang Tersangka Pencabulan Resmi Ditahan

PANDEGLANG (IM)- Tersangka pencabulan anggota DPRD Pandeglang, Yangto resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang. Yangto ditahan setelah berkas perkaranya memasuki tahap II.

Berdasarkan pantauan di Kejari Pandeglang, Kamis (23/2), Yangto keluar kantor Kejari sekitar pukul 12.45 WIB. Terlihat dia mengenakan rompi tahanan kejaksaan berwarna merah. Yangto langsung digiring jaks masuk ke mobil tahanan. "Kami selaku penuntut umum melakukan penahanan terhadap Y selama dua puluh hari ke depan," kata Kasi Pidum Kejari Pandeglang, Mario Nicolas kepada wartawan.

Mario Nicolas menjelaskan, penahanan itu dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Yangto ditahan selama dua puluh hari di Rutan Pandeglang. "(Penahanan) untuk kepentingan penuntutan," katanya.

Selanjutnya pihak dia jaks akan segera melimpahkan berkas perkara ini ke pengadi-

lan negeri Pandeglang Yangto sendiri dijerat dengan Pasal 289 dan/atau 281 KUHP "Perkara ini segera kami limpahkan," pungkasnya.

Seperti diketahui, kasus dugaan pencabulan yang menjerat anggota DPRD Pandeglang Yangto memasuki babak baru. Jaks mengatakan berkas perkara tersebut sudah lengkap. "Sudah P21," kata Kepala Kejaksaan negeri Kejari Pandeglang, Helena Octaviane kepada wartawan, Senin (20/2).

Yangto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan pada 3 Desember 2022. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan pencabulan terhadap seorang perempuan di Pandeglang. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, status Yangto sebagai Ketua Fraksi NasDem di DPRD Pandeglang dicopot. Dia juga mengaku marah atas proses penetapan dia sebagai tersangka. Yangto menegaskan tak terima ditetapkan sebagai tersangka. ● pra